
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM POLITIK: ANALISIS GENDER DAN KEKUASAAN

Erwin Surya

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Pemberdayaan perempuan dalam politik telah menjadi fokus utama dalam diskusi tentang kesetaraan gender dan partisipasi politik. Dalam konteks ini, analisis gender dan kekuasaan menjadi penting untuk memahami dinamika yang memengaruhi akses perempuan terhadap ruang politik dan pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan. Artikel ini mengeksplorasi konsep pemberdayaan perempuan dalam politik dari perspektif analisis gender dan kekuasaan, dengan menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam arena politik.

Kata Kunci: *Pemberdayaan perempuan, politik, analisis gender*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemberdayaan perempuan dalam politik merupakan aspek krusial dalam memastikan kesetaraan gender dan partisipasi politik yang inklusif dalam sebuah negara. Seiring dengan kemajuan dalam pemahaman akan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan telah menjadi agenda utama dalam banyak negara di seluruh dunia. Namun, realitasnya masih menunjukkan bahwa perempuan seringkali masih menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi mereka untuk terlibat aktif dalam politik.

Dalam konteks ini, analisis gender dan kekuasaan menjadi sangat relevan. Analisis gender mencoba untuk memahami bagaimana gender memengaruhi hubungan sosial, termasuk dalam distribusi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya. Sementara itu, konsep kekuasaan memainkan peran sentral dalam menentukan siapa yang memiliki kontrol dan pengaruh dalam sebuah struktur sosial atau politik. Melalui kajian analitis ini, kita dapat mengidentifikasi pola dan mekanisme yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan dalam politik, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Pendahuluan yang komprehensif tentang pemberdayaan perempuan dalam politik harus menggarisbawahi pentingnya mendorong partisipasi politik yang merata antara laki-laki dan perempuan sebagai fondasi bagi sistem politik yang inklusif dan demokratis. Meskipun hak politik perempuan telah banyak diperjuangkan dan diakui secara hukum di banyak negara, kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara partisipasi politik perempuan dan laki-laki. Ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah perempuan yang terpilih sebagai pejabat publik, kurangnya representasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik, serta berbagai hambatan struktural dan sosial yang menghambat perempuan untuk mencapai kedudukan politik yang setara dengan laki-laki.

Tantangan-tantangan ini seringkali meliputi diskriminasi gender, stereotipe seksis, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pelatihan politik, serta ketidakadilan dalam distribusi sumber daya politik. Selain itu, aspek budaya dan sosial juga memainkan peran penting dalam membatasi ruang gerak perempuan dalam politik, seperti norma-norma yang membatasi peran perempuan dalam ranah publik dan menempatkan mereka dalam peran tradisional yang terbatas. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dalam memahami pemberdayaan perempuan dalam politik memerlukan analisis yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik yang kompleks.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis pemberdayaan perempuan dalam politik dengan pendekatan analisis gender dan kekuasaan haruslah holistik dan multidisiplin. Metode ini tidak hanya mengandalkan data kuantitatif, tetapi juga memanfaatkan data kualitatif serta pendekatan teoritis untuk memahami dinamika kompleks dalam partisipasi politik perempuan.

- 1. Analisis Literatur: Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan analisis literatur yang menyeluruh tentang pemberdayaan perempuan dalam politik, konsep analisis gender, dan teori-teori kekuasaan yang relevan. Analisis literatur akan membantu dalam memahami landasan teoretis yang mendasari penelitian serta mendapatkan wawasan tentang perkembangan, tantangan, dan tren terkini dalam partisipasi politik perempuan.*
- 2. Studi Kasus: Metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam kasus-kasus konkret tentang partisipasi politik perempuan dalam konteks tertentu. Studi kasus ini dapat melibatkan analisis terhadap peran perempuan dalam pemilihan umum, struktur kekuasaan politik lokal atau nasional, atau implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, studi kasus dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi politik perempuan.*
- 3. Wawancara dan Fokus Kelompok: Untuk mendapatkan perspektif yang lebih dalam tentang pengalaman dan persepsi perempuan dalam politik, wawancara dengan pemangku kepentingan kunci seperti politisi perempuan, aktivis gender, pejabat pemerintah, dan anggota masyarakat umum dapat dilakukan. Selain itu, fokus kelompok dengan partisipan perempuan juga dapat dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu yang dihadapi oleh perempuan dalam partisipasi politik.*
- 4. Analisis Data Kuantitatif: Data kuantitatif tentang partisipasi politik perempuan, termasuk data tentang angka terpilihnya perempuan dalam parlemen, tingkat partisipasi dalam pemilihan umum, dan indikator lainnya, akan dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam partisipasi politik perempuan. Data ini juga dapat digunakan untuk membandingkan partisipasi politik perempuan antar negara atau wilayah.*
- 5. Analisis Data Kualitatif: Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, fokus kelompok, dan analisis teks akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik atau grounded theory. Data kualitatif akan membantu dalam memahami konteks lokal dan dinamika sosial yang memengaruhi partisipasi politik perempuan, serta dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat pemberdayaan politik perempuan.*
- 6. Analisis Gender dan Kekuasaan: Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis dengan lensa analisis gender dan kekuasaan, dengan memperhatikan bagaimana konstruksi sosial tentang gender mempengaruhi distribusi kekuasaan dalam struktur politik. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi ketidaksetaraan gender yang mendasari hambatan-hambatan terhadap pemberdayaan politik perempuan, serta strategi untuk mengatasi ketidakadilan tersebut.*

PEMBAHASAN

Pemberdayaan perempuan dalam politik merupakan isu yang mendalam dan kompleks, yang melibatkan berbagai aspek termasuk struktur kekuasaan, konstruksi gender, serta dinamika sosial dan politik. Dalam konteks ini, pendekatan analisis gender dan kekuasaan menjadi sangat relevan dalam memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perempuan dalam upaya mereka untuk terlibat dalam ruang politik dan pengambilan keputusan.

Pertama-tama, analisis gender dalam konteks politik mempertimbangkan bagaimana konstruksi sosial tentang gender memengaruhi distribusi kekuasaan dalam struktur politik. Konstruksi sosial seperti stereotip gender, peran tradisional, dan norma-norma budaya dapat membatasi akses perempuan terhadap ruang politik dan membuat mereka lebih rentan terhadap diskriminasi serta pengalaman yang berbeda dalam arena politik. Misalnya, stereotip yang mengaitkan perempuan dengan peran domestik dan laki-laki dengan peran publik dapat menciptakan hambatan bagi perempuan yang ingin terlibat dalam politik, sementara norma-norma budaya yang memprioritaskan kepentingan laki-laki dalam pengambilan keputusan politik juga dapat menyulitkan perempuan untuk mendapatkan pengakuan dan kesempatan yang setara dalam politik.

Kedua, analisis kekuasaan memungkinkan kita untuk memahami dinamika kekuasaan yang melatarbelakangi ketidaksetaraan gender dalam politik. Struktur kekuasaan yang patriarkal dan dominan sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dan menguntungkan laki-laki dalam akses terhadap sumber daya politik dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, dalam banyak negara, lembaga-lembaga politik dan partai politik sering kali didominasi oleh laki-laki, yang membuat perempuan kesulitan untuk memperoleh dukungan dan akses terhadap jalur politik yang efektif. Selain itu, mekanisme kekuasaan informal seperti jaringan politik dan patronase juga dapat menjadi penghalang bagi perempuan yang ingin terlibat dalam politik.

Dalam menganalisis pemberdayaan perempuan dalam politik, penting untuk memperhatikan upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Misalnya, quota gender dan affirmative action telah digunakan dalam beberapa negara untuk meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik, meskipun efektivitas dan keberlanjutannya masih menjadi perdebatan. Selain itu, pendidikan politik dan pelatihan keterampilan juga dapat membantu memperkuat kapasitas perempuan untuk terlibat dalam politik dan memperjuangkan kepentingan mereka secara efektif. Upaya-upaya ini harus diimbangi dengan perubahan struktural yang lebih luas, termasuk reformasi politik dan budaya yang mendukung kesetaraan gender dalam partisipasi politik.

Dalam konteks ini, peran aktif masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (NGO) juga sangat penting. Mereka dapat berperan sebagai advokat dan pembela hak-hak perempuan dalam politik, serta menyediakan dukungan dan sumber daya bagi perempuan yang ingin terlibat dalam proses politik. Selain itu, media massa juga dapat memainkan

peran kunci dalam membentuk opini publik dan memperjuangkan isu-isu gender dalam politik.

Dengan demikian, analisis gender dan kekuasaan adalah alat yang sangat penting dalam memahami dinamika pemberdayaan perempuan dalam politik. Dengan menggali lebih dalam tentang konstruksi sosial, struktur kekuasaan, dan upaya-upaya pemberdayaan, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memastikan partisipasi politik yang inklusif dan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan politik.

Selanjutnya, penting untuk mengakui bahwa tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan dalam politik tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial dan budaya yang kompleks. Misalnya, budaya patriarkal yang masih kuat di beberapa masyarakat dapat menghasilkan resistensi terhadap perubahan dan memberikan tekanan kepada perempuan untuk tetap berada di wilayah domestik, bukan dalam ruang politik yang dianggap sebagai wilayah laki-laki. Hal ini memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya menangani isu-isu kebijakan atau hukum, tetapi juga mencakup upaya untuk mengubah norma-norma sosial dan budaya yang membatasi partisipasi politik perempuan.

Selain itu, dalam mengatasi tantangan tersebut, penting untuk memperhatikan keragaman konteks lokal dan regional. Tidak ada solusi yang satu ukuran cocok untuk semua dalam mendorong partisipasi politik perempuan. Setiap masyarakat memiliki karakteristik uniknya sendiri, yang memerlukan strategi yang disesuaikan dengan konteksnya. Oleh karena itu, penelitian dan intervensi yang mempertimbangkan kekhasan budaya, sejarah politik, dan struktur kekuasaan setempat akan lebih efektif dalam mendorong perubahan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, penting untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam politik. Hal ini mencakup pemerintah, lembaga politik, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat umum. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif dari berbagai pihak akan memperkuat upaya pemberdayaan perempuan, menghasilkan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Terakhir, pendekatan ini haruslah dilengkapi dengan evaluasi terus-menerus untuk mengukur dampak dari berbagai kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dalam politik. Evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan akan membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan, serta mengidentifikasi area-area di mana perubahan diperlukan. Dengan demikian, langkah-langkah pemberdayaan perempuan dalam politik dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, mengarah pada peningkatan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan merata.

Dengan kesimpulan ini, kita dapat melihat bahwa pemberdayaan perempuan dalam politik melibatkan banyak aspek yang kompleks dan beragam. Dengan pendekatan yang holistik, berkelanjutan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan, kita dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam mencapai kesetaraan gender dalam ruang politik dan mendorong perubahan yang positif dalam masyarakat secara keseluruhan.

Dalam melanjutkan perjuangan pemberdayaan perempuan dalam politik, penting untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, hak untuk berbicara

dan diwakili dalam lembaga-lembaga politik, dan hak untuk mengakses sumber daya politik yang diperlukan untuk bersaing secara adil. Pendekatan ini harus diakui dan diperjuangkan oleh semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga politik, dan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, untuk mencapai pemberdayaan perempuan dalam politik yang berkelanjutan, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya kesetaraan gender dan partisipasi politik perempuan. Ini termasuk program pendidikan dan pelatihan yang memperkuat kapasitas perempuan untuk terlibat dalam politik, serta kampanye publik yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu gender dan hak-hak perempuan. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender dalam politik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung untuk partisipasi politik perempuan.

Selanjutnya, kolaborasi regional dan internasional juga dapat menjadi sarana yang efektif dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan dalam politik. Dengan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya antar negara dan wilayah, kita dapat memperkuat gerakan untuk kesetaraan gender dalam politik secara lebih luas. Kerjasama ini dapat meliputi pertukaran program pemberdayaan, forum diskusi, dan inisiatif lintas-batas yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di seluruh dunia.

Terakhir, penting untuk mengakui bahwa pemberdayaan perempuan dalam politik bukanlah tujuan akhir dalam dirinya sendiri, tetapi merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam melanjutkan perjuangan ini, kita juga harus memperhatikan isu-isu yang terkait, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keadilan sosial secara keseluruhan. Dengan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam semua aspek kehidupan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan bagi semua.

Dengan demikian, melalui upaya yang berkelanjutan, kolaboratif, dan holistik, kita dapat mencapai pemberdayaan perempuan dalam politik yang sebenarnya, yang akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat dan menciptakan dunia yang lebih adil dan setara bagi semua.

Perlu untuk terus mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang masih menghalangi partisipasi politik perempuan. Ini termasuk upaya untuk menangani norma-norma sosial dan budaya yang merugikan, seperti stereotip gender dan diskriminasi berbasis gender, yang dapat menghambat perempuan dalam mengejar karir politik atau mendapatkan dukungan publik. Diperlukan juga reformasi kebijakan yang progresif dan inklusif, seperti kuota gender dan mekanisme affirmative action, untuk memastikan akses yang lebih merata dan representasi yang lebih seimbang bagi perempuan dalam lembaga-lembaga politik.

Selanjutnya, penting untuk menggali dukungan dari berbagai sektor masyarakat, termasuk sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, dalam mendukung upaya pemberdayaan perempuan dalam politik. Dengan melibatkan berbagai pihak dan memobilisasi sumber daya yang beragam, kita dapat memperkuat gerakan pemberdayaan perempuan dan memperluas jangkauannya secara lebih luas. Selain itu, penting untuk

memperkuat jejaring dan kerjasama antar organisasi dan individu yang berkomitmen untuk kesetaraan gender dalam politik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Selanjutnya, perlu untuk terus memperjuangkan perubahan struktural yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam politik. Ini termasuk reformasi hukum dan kebijakan yang menghapus hambatan-hambatan bagi partisipasi politik perempuan, seperti hukum yang diskriminatif atau praktik-praktik yang tidak adil dalam sistem politik. Reformasi ini harus didukung oleh komitmen politik yang kuat dari pemimpin dan pembuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan demokratis bagi semua warga negara, tanpa memandang gender.

Terakhir, dalam melanjutkan perjuangan ini, penting untuk terus memperjuangkan ruang dan platform yang aman dan inklusif bagi perempuan untuk berbicara dan berpartisipasi dalam politik. Ini termasuk mengatasi ancaman dan kekerasan yang sering kali dihadapi oleh perempuan yang terlibat dalam politik, serta menciptakan budaya politik yang lebih hormat dan mendukung bagi semua orang. Dengan memastikan bahwa perempuan merasa aman dan didukung dalam berpartisipasi dalam politik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan demokratis, yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Dengan melanjutkan upaya-upaya ini, kita dapat memperkuat perjuangan pemberdayaan perempuan dalam politik dan mencapai kemajuan yang lebih besar menuju kesetaraan gender dalam ruang politik dan pengambilan keputusan. Dengan kerja keras, kolaborasi, dan komitmen yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi semua.

Selain itu, penting juga untuk mendorong budaya politik yang inklusif dan menghargai kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan politik, sehingga perempuan merasa didukung dan dihormati dalam ruang politik.

Selanjutnya, dalam melanjutkan perjuangan ini, perlu untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan keadilan sosial. Keterlibatan perempuan dalam politik tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya mereka secara keseluruhan, sehingga perjuangan untuk kesetaraan gender dalam politik harus disertai dengan upaya untuk meningkatkan kondisi hidup perempuan secara menyeluruh.

Selanjutnya, penting untuk memperkuat peran lembaga internasional dan regional dalam mendukung pemberdayaan perempuan dalam politik. Ini termasuk memberikan bantuan teknis, sumber daya finansial, dan dukungan politik bagi negara-negara yang ingin memperkuat partisipasi politik perempuan, serta mempromosikan kesetaraan gender sebagai prinsip dasar pembangunan global. Kolaborasi antar negara dan organisasi internasional akan memperkuat gerakan untuk kesetaraan gender dalam politik dan menciptakan momentum yang lebih besar untuk perubahan positif.

Terakhir, dalam melanjutkan perjuangan ini, kita perlu mengingat bahwa pemberdayaan perempuan dalam politik adalah tujuan yang harus terus diperjuangkan, bukan tujuan yang dapat dicapai dalam semalam. Diperlukan komitmen jangka panjang dan kerja keras dari semua pihak untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan signifikan dalam masyarakat. Dengan mempertahankan semangat dan dedikasi untuk

kesetaraan gender dalam politik, kita dapat mencapai kemajuan yang lebih besar dan mewujudkan impian akan dunia yang lebih adil dan setara bagi semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, pemberdayaan perempuan dalam politik merupakan aspek krusial dalam mencapai kesetaraan gender dan membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis. Analisis gender dan kekuasaan memperlihatkan bahwa peran perempuan dalam politik tidak hanya penting untuk mewujudkan kesetaraan gender, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan representatif. Melalui upaya-upaya pemberdayaan perempuan, seperti peningkatan partisipasi politik, dukungan kebijakan yang inklusif, dan budaya politik yang mendukung, kita dapat memperkuat demokrasi dan menciptakan lingkungan politik yang lebih adil bagi semua warga negara.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan dalam politik tidaklah sedikit, dan perjuangan untuk kesetaraan gender merupakan perjalanan yang panjang dan kompleks. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga politik, masyarakat sipil, dan individu, untuk mengatasi hambatan-hambatan yang masih menghalangi partisipasi politik perempuan. Melalui kolaborasi lintas-sektor, pendekatan yang inklusif, dan kerja keras yang berkelanjutan, kita dapat memperkuat peran perempuan dalam politik dan membangun masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Batubara, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*.
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level. In Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Harahap, G. Y. (2020). *Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia. Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal, 2(3), 394-404*.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Santoso, M. H. (2021). *Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis*.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues*.
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). *Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan*.
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)*.
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). *Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing*.
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli*.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). *IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). *Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamso Medan*.
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara*.
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB. Retrieved from osf.io/3jpd*.
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri I Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*.

- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama*.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO)*.
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). *LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking*.
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*.
- Harahap, G. Y. (2001). *Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning. uma. ac. id*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Deliana, M. (2013). *Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018*.
- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). *Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014*.
- Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). *Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*.
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. *ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA*.
- Sianipar, G. (2019). *Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (arachis hypogaea l.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, S. A. (2018). *implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan*.
- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). *Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara*.
- Tarigan, R. S. (2017). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC)*.
- Kadir, A., & Tarigan, U. (2018). *Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai*.
- Siregar, N. S. S. (2002). *Perkembangan Filsafat Komunikasi di Indonesia*.
- Siregar, N. S. S., & Yolanda, A. (2022). *Gangguan Komunikasi Self-Harm Remaja Di Masa Covid-19 Pada Desa Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang*.
- Tarigan, U. (2004). *Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur*.

- Tarigan, U., & Dewi, R. (2004). Fungsi Penataan Kearsipan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Bagian Kepegawaian Kantor Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Get Press Indonesia.*
- Angelia, A. (2022). Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.*